

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Karya perutusan dan komunitas-komunitas lembaga hidup bakti cukup berkembang pesat terutama di Indonesia. Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi salah satunya mendirikan biara pusat dan berkarya di Jawa Barat tepatnya di Kota Sukabumi. Karya perutusan yang diawali para Misionaris dari *Bergen Op Zoom* Belanda. Kongregasi SFS hadir dan melayani di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Pulau Mentawai. Para suster melayani dengan karya perutusan awal adalah rumah sakit St. Lidwina yang telah berubah nama menjadi RSU Syamsudin Sukabumi. Selama 84 tahun di Indonesia para anggota berasal dari berbagai Pulau di Indonesia dan menangani berbagai karya yang meliputi karya pastoral, kesehatan, pendidikan dll. Setiap komunitas para Suster Fransiskan Sukabumi memiliki karya perutusan yang berbeda satu sama lain dan juga jumlah para suster yang berada dalam setiap Komunitas.

Hadirnya karya dan komunitas lembaga hidup bakti menurut dokumen *Guidelines for the Admisitration of the Assets in Institute of Consecrated Life and Societies of Apostolik*, Libreria Editrice Vaticana (2014), setiap Kongregasi/Lembaga hidup bakti wajib mengelola aset, membuat laporan keuangan, memiliki pengendalian internal dan anggaran serta menjalin kerjasama dengan para ahli sehingga sistem informasi akuntansi sangat

dibutuhkan untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporakan dan menyimpan data-data dalam setiap transaksi yang dilakukan lalu menyajikan laporan tersebut dalam catatan-catatan yang berguna untuk menilai, mengevaluasi, menganalisis dan memonitoring serta pada akhirnya mengambil keputusan.

Kongregasi adalah organisasi nirlaba/non profit keagamaan atau sering disebut lembaga hidup bakti yang terdiri dari para anggota yang menjanjikan 3 kaul yaitu kesederhanaan, ketaatan dan kesucian serta merealisasikan kharisma dan spritualitas pendiri Kongregasi dengan mengelola karya pelayanan. Kongregasi juga tidak terlepas pada kebutuhan akan sistem informasi akuntansi dalam menjalankan segala aktivitas pelayanan dan kebutuhan dalam komunitas-komunitas sebagai salah satu informasi yang berguna dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan rumah tangga Kongregasi itu sendiri.

Pada awal Agustus 2014, Bapa Gereja yaitu Kardinal Joao Braz de Aviz dan Uskup Agung Jose Rodriguez Carballo OFM, masing-masing sebagai prefek dan sekretaris Kongregasi menerbitkan surat edaran tentang penggunaan sumber daya keuangan oleh para ordo religius baik yang regular maupun sekular. Berita yang dilansir media online Vatikan *UCAN News* (07/08/14), para Bapa Gereja menegaskan kepada komunitas-komunitas bahwa lembaga hidup bakti/Kongregasi harus membuat anggaran dan pembukuan berdasarkan praktik modern dan memastikan pengeluaran untuk pelayanan sesuai dengan tujuan pendirian Kongregasi dan kebaikan seluruh

Gereja sehingga diharapkan terjadi “Reformasi secara administrasi” dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi dalam lembaga hidup bakti itu sendiri dengan berpedoman pada standar di Negara di mana lembaga hidup bakti berada.

Standar Akuntansi di Indonesia 2015 yang diterbitkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang secara khusus menguraikan pelaporan keuangan pada entitas nirlaba pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45, yang bertujuan mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba yang memiliki karakteristik yang membedakannya dari laporan keuangan perusahaan yaitu cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan segala kegiatan dalam entitas nirlaba.

Sebagai contoh entitas nirlaba dalam mendapatkan berbagai macam sumbangan untuk menunjang keberlangsungan aktivitas pelayanan maupun kegiatan sosial lainnya, sehingga informasi dari setiap laporan keuangan entitas nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut PSAK no. 45 memiliki tujuan pada pelaporan keuangannya yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan donatur yang telah memberikan sumber dana yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali bagi lembaga nirlaba. Kongregasi SFS juga memiliki sumber dana yang berasal dari luar negeri baik dari Kongregasi di Belanda (*Bergen op Zoom*), dan dari dalam negeri

untuk keberlangsungan Kongregasi maupun pembangunan sarana prasarana Kongregasi sehingga membutuhkan pelaporan yang dapat dimengerti oleh pihak Kongregasi maupun para pemberi sumber daya ( donatur Kongregasi).

Para biarawan-biarawati yang menjanjikan kaul kemiskinan/kesederhanaan dalam profesi religius, bukan berarti harus hidup dalam ketidaktahuan tentang realitas ekonomi atau uang yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. *Guidelines for the Admisitration of the Assets in Institute of Consecrated Life and Societies of Apostolik Life* ini juga menyatakan perlunya *transparency and Supervison* sehingga Kongregasi juga harus memiliki sistem pengendalian Internal yang mampu mengendalikan seluruh aset Kongregasi, karena sebagian besar anggota dalam komunitas kurang berminat tentang ekonomi. Mengutip pesan Pemimpin tertinggi Gereja Katolik yaitu Paus Fransiskus dokumen tersebut menegaskan: “ *Invite the participants to combine the priorty of the charismatic/spiritual primary dimension and efficiency, which has its own appropriate in administrative tradition of the institute which does not tolerate waste and attentive the the good use of resources* ”.

Kongregasi perlu menata administrasi namun tetap berdasarkan semangat/spirit dari lembaga hidup bakti, agar terjadi efisiensi sehingga dengan laporan dan posisi laporan keuangan dapat meminimalisir kesalahan terkait transaksi dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari yang diatur dalam komunitas para pemeluk hidup bakti sehingga pengawasan yang efisien termasuk audit akan membantu komunitas religius baik yang diosesan maupun

tingkat Kepausan untuk menghindari defisit sehingga tata kelola perlu dibenahi terlebih dahulu.

Menurut Agoes (2015), dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Soegijapranata, beliau memaparkan bahwa tata kelola yang baik adalah suatu proses untuk menentukan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerja yang semuanya membutuhkan suatu ketransparanan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan lainnya atau nilai dari perusahaan itu sendiri sehingga dalam hal ini diharapkan dengan menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*) pada tata kelola lembaga non profit seperti Kongregasi dapat menuju GCC (*Good Corporate Congregation*).

Menurut Robbins, Stephen dan Timothy A Judge (2009), Pemikiran kelompok (*groupthink*) mengalami transformasi menjadi pergeseran kelompok (*group shift*), yaitu perubahan resiko keputusan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang dibuat oleh anggota dalam kelompok dapat menjadi resiko konservatif atau lebih besar dengan segala kebijakan, keputusan yang mengikat sehingga kelompok itu harus keluar dari zona nyaman atau bertransformasi/ mengubah sistem dan menjalankan suatu keputusan atau merealisasikan suatu rekomendasi dan menjadi suatu keputusan untuk semua anggota kelompok. Resiko mengubah suatu sistem atau mengendalikan sistem itu sendiri dengan membuat suatu pedoman/ petunjuk maupun arah kelompok itu sendiri.

Pertemuan para anggota Lembaga hidup bakti di menunjukkan, masalah nyata dan adanya pergeseran kelompok dengan segala keputusan-keputusan menindaklanjuti surat edaran tersebut. Sejumlah ordo/kongregasi di seluruh dunia mengalami pertumbuhan dalam hal kualitas dan kuantitas anggota dan karya pelayanan misalnya untuk menolong sesama yang lemah miskin tersingkir dan difabel, mengelola rumah sakit, sekolah, membayar gaji para karyawan, serta merasakan tantangan dengan berbagai aturan pemerintahan mulai dari BPJS, *Tax Amnesty*, kepemilikan NPWP dll. Ada akhirnya Kongregasi harus meningkatkan transparansi keuangan.

Semua anggota ordo/kongregasi harus menyadari pentingnya bekerja dengan anggaran karena hal ini mencerminkan nilai-nilai dan semangat lembaga. Menurut hukum Gereja setiap lembaga hidup bakti diwajibkan untuk memiliki bendahara atau dalam lembaga hidup bakti sering disebut ekonom, dan ekonom tersebut harus menerima pelatihan khusus atau studi khusus terkait penganggaran dan pembukuan, tetapi setiap anggota dari setiap lembaga hidup bakti harus memiliki gambaran dan pedoman umum tentang sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan pengembangan sistem pengendalian akuntansi yang efektif dengan pedoman/ petunjuk yang telah dipersiapkan.

Setiap aktivitas membutuhkan pedoman/ petunjuk untuk memperlancar sistem itu sendiri, menurut Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang (2008), pedoman/petunjuk bertujuan membantu Paroki dalam menyusun laporan keuangan, menilai prospek laporan arus kas, informasi

sumber daya ekonomi, menciptakan keseragaman dalam perlakuan akuntansi dalam penyajian, sehingga meningkatkan daya banding baik dari tahun ke tahun maupun antar Paroki, serta acuan menyusun laporan keuangan. Transaksi untuk proses pembelian segala kebutuhan misalnya konsumsi, biaya bahan pembersih, biaya kebutuhan para suster, biaya gaji karyawan dll, serta pendapatan utama dari gaji para suster yang bekerja pada karya pelayanan dan juga berbagai sumbangan sehingga transparansi akan laporan keuangan Kongregasi dengan sistem informasi akuntansi sangatlah penting sebagai pedoman. Pertanggungjawaban pada donatur dan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dengan laporan yang informatif sesuai standar akuntansi.

Sebagai salah satu lembaga hidup bakti diosesan Keuskupan Bogor yang taat pada hirarki dalam Gereja Katolik dalam kesatuan dengan Gereja secara universal, dengan diedarkannya Pedoman Administrasi dan Aset di lembaga hidup bakti dan serikat hidup kerasulan *Libreria Editrice Vaticana* (2014), Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi wajib menciptakan suatu sistem informasi akuntansi yang sesuai pedoman yang diterapkan Vatikan dan menyesuaikan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan/ standar lembaga Nirlaba di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Akuntansi ada beberapa masalah yang telah diidentifikasi di Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi.

Berikut adalah temuan masalah dalam sistem informasi akuntansi yang terjadi di Kongregasi SFS yaitu :

a. Laporan keuangan tidak informatif/tidak relevan

Berikut adalah temuan yang menyebabkan laporan keuangan tidak informatif:

i. Sistem informasi akuntansi Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi dalam pelaporan: Kongregasi masih menggunakan sistem buku besar yang diinput secara manual dengan sistem pembukuan sederhana yaitu pendapatan dengan kas yang masuk disetiap Komunitas dicatat pada debit dan segala pengeluaran dan biaya lainnya dicatat pada sisi kredit termasuk penyetoran pada bank (Dapat dilihat pada lampiran 2 Laporan operasional Kas Kongregasi).

ii. Adanya *gap* antara pelaporan yang disiapkan oleh Kongregasi masih terpisah-pisah dan tersendiri mulai dari pelaporan aset, pendapatan serta tidak ada catatan mengenai pelaporan tersebut sehingga kesulitan menganalisis serta tidak dipahami oleh pelayan umum dan anggota lainnya. Hal ini berbeda dengan pelaporan yang ditetapkan PSAK 45 yang terdiri dari Laporan keuangan diakhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Dapat dilihat pada lampiran 1 tentang laporan keuangan Kongregasi SFS ).

b. Penundaan Pelaporan Keuangan

Menurut PSAK dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengenai kendala informasi yang relevan dan andal adalah masalah ketepatan waktu dimana terjadi penundaan yang tidak seharusnya



pada pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Berikut penyebab penundaan pelaporan di Kongregasi SFS:

- i. Beberapa komunitas melaporkan melebihi tanggal yang telah ditentukan akibatnya saat rapat pelayan umum kongregasi dan beserta dewan pelayanan umum setiap bulannya menjadi kesulitan dan bahkan terhambat untuk mengambil keputusan untuk program kongregasi dan kegiatan-kegiatannya. (Dapat dilihat pada lampiran 16 hasil Wawancara dengan Sr. Marietta SFS pertanyaan no.2) dan (Dapat dilihat pada lampiran 19, notulen hasil sidang kapitel tertinggi pernyataan Sr Bernadeth SFS mengenai keterlambatan komunitas melaporkan keuangan).
- ii. Ada selisih antara data perhitungan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan jumlah kas yang ada, Selisih kas pada komunitas maupun karya yang mengakibatkan kesulitan dalam operasional.
- iii. Belum ada kesepakatan untuk menghitung kas fisik setiap akhir bulannya dengan angka yang tertera pada laporan keuangan sehingga memiliki dampak finansial yaitu terjadi selisih kas pada saat pergantian tugas sebagai bendahara.
- iv. Faktor *Human eror* (Dapat dilihat pada lampiran 16 Wawancara Pra survey dengan Sr Marietta SFS pertanyaan no 2) lupa mencatat pada buku setiap pengeluaran saat tidak memiliki nota, salah memasukkan transaksi dalam suatu akun (salah masuk pos), atau pendobelan pencatatan (lampiran 21 selisih kas sebesar Rp. 10.185.656 pada

Karya Kongregasi dalam Komunitas Wirosari Purwodadi dan ( Dapat dilihat pada lampiran 16 wawancara pra survey dengan Sr. Marietta SFS). Selisih tersebut menghambat pelaporan keuangan dan operasioal.

c. Terjadinya kelemahan dalam Pelaporan keuangan

Membenahi dan menetapkan sistem informasi akuntansi memiliki kualitas yang andal dan penyajiannya yang jujur , laporan tidak meyesatkan dan terhindar dari kesalahan yang material maka perlu sistem tata kelola yang baik dengan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, namun realita dalam kongregasi adalah sebagai berikut :

- i. Selama 84 tahun berkarya dan hadir di Indonesia belum memiliki pedoman tentang sistem akuntansi Kongregasi SFS, penyebabnya karena belum dibentuknya tim keuangan (sumber daya manusia ), masih berhenti pada tahap konsultasi pada ahli-ahli namun belum menghasilkan keputusan, untuk membuat aturan maupun alur dalam setiap transaksi. (Dapat dilihat pada lampiran 20 rekomendasi Kelompok Harta Benda).
- ii. Sumber daya suster (SDS), yang terbatas, masih nyaman dengan sisem pembukuan yang sederhana dengan pelaporan hanya sebatas buku besar dan pelaporan yang terpisah antara aset, sumbangan, pendapatan dan pengeluaran.

- iii. Sistem sentralisasi tidak berjalan karena masing-masing komunitas menjalankan operasional keuangan secara mandiri, ada faktor tidak percaya dana akan cepat cair dari komunitas-komunitas cabang, apabila ada kebutuhan mendesak, misalnya pembangunan dan kebutuhan para suster lainnya, akibatnya secara keuangan dana menumpuk di masing-masing komunitas karena tidak disetor ke Pusat yang oleh masing-masing komunitas. Dampak non keuangan keputusan bersama kurang dipatuhi dan ada “terpisah antara karya dan Kongregasi secara umum padahal karya dan semua yayasan adalah milik Kongregasi. ( Dapat dilihat pada lampiran 18 Keputusan kapitel SFS 2016).
- iv. Kesulitan saat ada pergantian/perpindahan anggota yang menjadi bendahara di masing-masing rumah cabang dan Ibu Komunitas (Dapat dilihat pada Lampiran 16 hasil Wawancara Pra survey Pertanyaan no. 1 dengan Sr. Marietta SFS).
- v. Tidak adanya aturan yang baku mengakibatkan tidak adanya evaluasi saat terjadi *fraud* maka upaya meminimalisir *Fraud* sebagai bahan pembelajaran dari banyak Kongregasi lain yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang dipercaya menyalahgunakan tugas mereka dengan mengambil aset baik kas maupun non kas. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan dalam keluarga yang mendesak, ada peluang karena kurangnya pengendalian maupun tugas rangkap dalam karya pelayanan maupun

dalam komunitas. (Dapat dilihat pada lampiran 16 Wawancara dengan Sr. Marietta SFS).

- vi. Hasil Kapitel 2016 para kapitaris (para suster) menyetujui perlunya tim internal audit untuk mengantisipasi kecurangan pada bagian administrasi dengan memberlakukan sistem informasi akuntansi yang sentralisasi dan merancang *software* yang membantu Kongregasi dengan berbagai cabang yang tersebar di Keuskupan Bogor dan Keuskupan Agung Semarang serta kompleksitas karya yang ditangani. (Dapat dilihat pada lampiran 20 rekomendasi evaluasi kapitel kelompok harta benda tahun 2012, hasil wawancara Pra survey dengan Sr M. Marietta SFS dan hasil rekomendasi kelompok harta benda dalam Sidang Kapitel September 2016).

Setelah mengidentifikasi masalah tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kelemahan yang paling utama adalah tidak adanya pedoman/ petunjuk dalam sistem informasi akuntansi sehingga Kongregasi perlu membenahi terlebih dahulu sistem tata kelola terutama dalam sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan beralih dari hanya pemikiran kelompok tetapi menjadi pergeseran kelompok dengan suatu keputusan keluar dari zona nyaman dan aksi nyata menuju suatu keputusan untuk bertransformasi menuju pada pelaporan yang andal, relevan dan tepat waktu.

Lembaga hidup bakti juga dapat menerapkan *Good Congregation Governance* di Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi dengan

mengembangkan dan merealisasikan sistem tata kelola yang membawa pada suatu reformasi sistem informasi akuntansi. Hal inilah yang memotivasi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul :

**“PENATAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN TATA KELOLA LEMBAGA NIRLABA DI KONGREGASI SUSTER FRANSISKAN SUKABUMI”.**

## **1.2. Rumusan masalah**

Dengan latar belakang yang menjadi masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengapa laporan keuangan Kongregasi tidak informatif/ tidak relevan?
- b. Mengapa terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan?
- c. Mengapa terjadi kelemahan dalam pelaporan keuangan?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang mau dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengapa laporan keuangan Kongregasi tidak informatif/tidak relevan
- b. Untuk mengetahui mengapa terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

- c. Untuk mengetahui mengapa terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini :

- a Bagi Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi.

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan atau rekomendasi yang dapat membantu Kongregasi dalam mereformasi sistem informasi akuntansi dengan sistem tata kelola yang baik.

- b Bagi Kalangan Akademisi

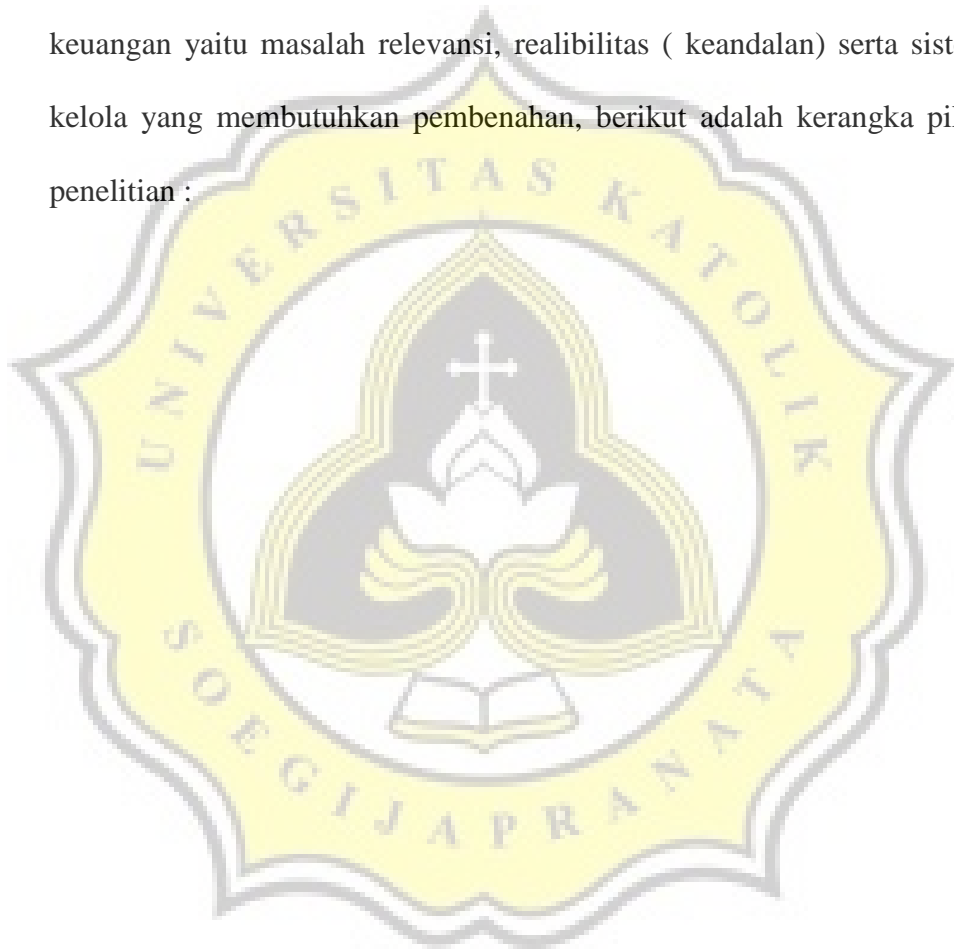
Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi/ informasi tambahan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dan tata kelola pada lembaga nirlaba.

- c Bagi Penulis

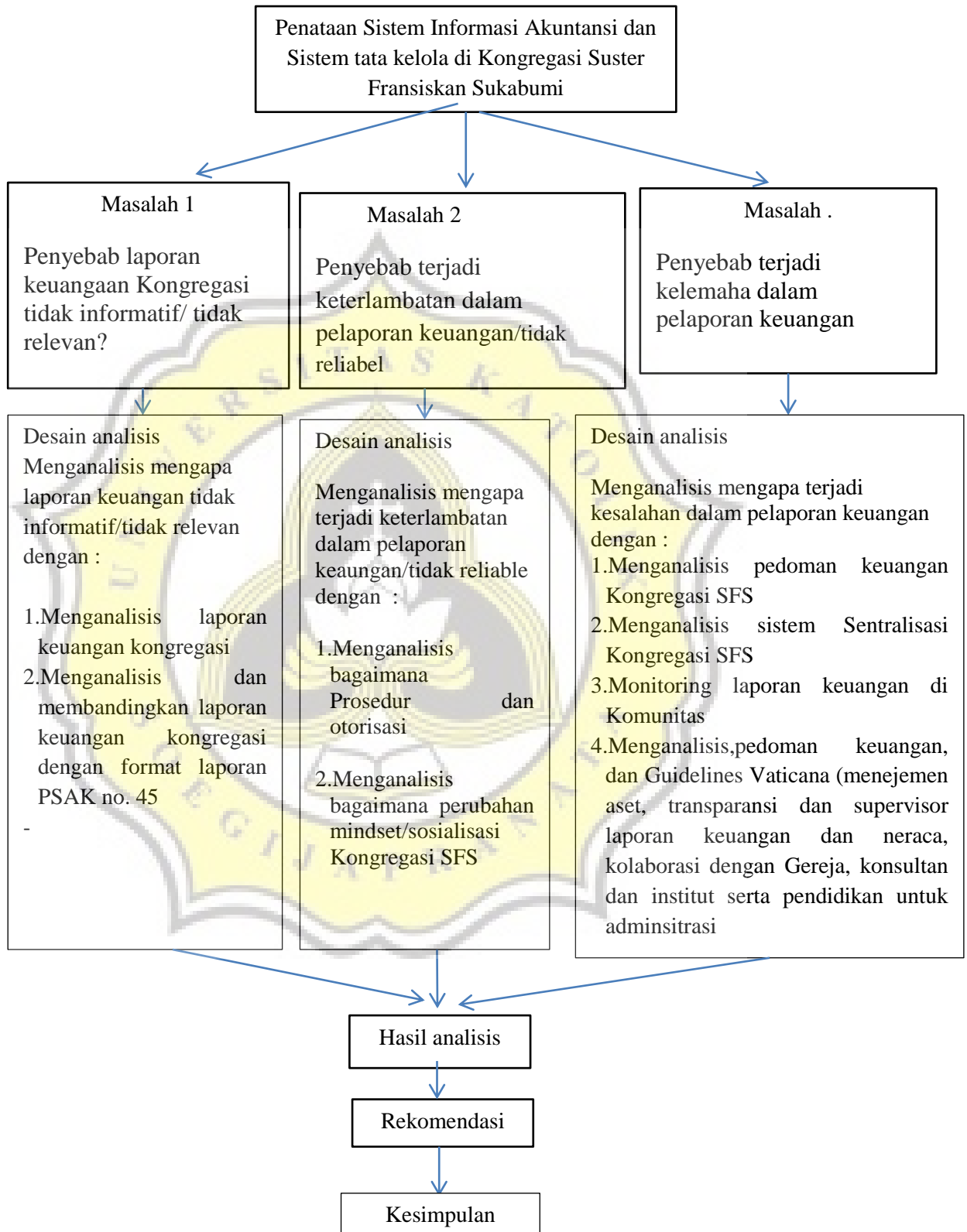
Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk merealisasikan ilmu serta menghasilkan daya banding yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan realitas pada lembaga nirlaba secara khusus dalam kongregasi/Lembaga hidup bakti dalam hal sistem informasi akuntansi dan tata kelolanya.

#### 1.4. Kerangka Pikir

Sistem Informasi Akuntansi adalah hal yang penting untuk menghasilkan sajian angka untuk mengambil keputusan baik secara internal maupun eksternal. Kongregasi memiliki masalah yang terkait karakteristik kualitatif yang berperan besar sebagai sumber informasi utama dalam laporan keuangan yaitu masalah relevansi, realibilitas ( keandalan) serta sistem tata kelola yang membutuhkan pembenahan, berikut adalah kerangka pikir dari penelitian :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir





## 1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini akan dipaparkan dan diuraikan latar belakang penulisan skripsi. Bagian-bagian yang ada pada latar belakang ini adalah latar belakang masalah, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian serta sistematika penulisan.

### Bab II Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan teori maupun konsep-konsep yang dijelaskan dan dipaparkan dalam penelitian ini mulai dengan sistem, sistem informasi informasi akuntansi, efisiensi, efektifitas, *Good Corporate Governance*, Pengendalian internal, Lembaga hidup bakti, *Fraud* Organisasi Nirlaba, Budaya Organisasi dan Perubahan *mindset*, Sentralisasi, Karakteristik kualitatif, Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Menurut PSAK no. 45, laporan keuangan Pedoman administrasi aset pada lembaga hidup bakti dan serikat hidup kerasulan.

### Bab III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, jenis dan sumber data, metode analisis serta alat evaluasi data.

#### Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis masalah dan pembahasannya, yaitu ada 3 masalah yang akan diuraikan di Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi dan memberikan suatu solusi atau rekomendasi penataan terkait 3 masalah yang diangkat oleh penulis.

#### Bab V Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran serta keterbatasan dan implikasi penelitian pada Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi.

